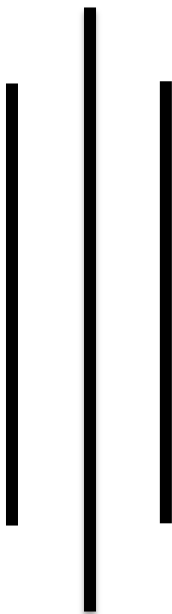




**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BULUSPESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN BULUSPEANTREN
KABUPATEN KEBUMEN**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jl.Kejayan No.191 Setrojenar Buluspesantren

Email:kecamatanbuluspesantren06@gmail.com

Website:kecbuluspesantren-kebumenkab.go.id Kode Pos 54391

Buluspesantren, Februari 2026

Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kepala BPKPD Kab. Kebumen
Di-

KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Keuangan OPD Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025.	1 buku	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Diterima tanggal.....
Penerima

Pengirim
Camat Buluspesantren,

.....

Nomor telepon.....

Azida Nurul Hayya, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781017 199711 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azida Nurul Hayya, S.STP., M.Si.
NIP : 19781017 199711 2 002
Jabatan : Camat Buluspesantren
SKPD/OPD/Unit : Kecamatan Buluspesantren

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Buluspesantren untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 merupakan tanggungjawab saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Laporan Keuangan SKPD sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 31 Desember 2025
Camat Buluspesantren

Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781017 199711 2 002

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Kecamatan Buluspesantren pada Tahun 2025 tidak adanya target pendapatan.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	0	0	0	0

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp. 1.839.434.492,- dari anggaran sebesar Rp. 1.969.787.200,- atau mencapai 93,38%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp 3.231.098.529,- dari anggaran sebesar Rp.3.632.147.000,- atau mencapai 88.96%. Dan mengalami kenaikan sebesar 4,42%.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	1.604.364.000	1.484.711.800	92,54
2. Belanja Barang	330.484.200	320.117.892	96,86
3. Belanja Hibah	-	-	
Jumlah Belanja Operasi	1.934.848.200	1.804.829.692	93,28
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	-	-	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.939.000	34.604.800	99,04
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Modal	33.939.000	34.604.800	99,04
JUMLAH BELANJA	1.969.787.200	1.839.434.492	93,38

2. Realisasi Belanja Per Kegiatan

Rician realisasi belanja per kegiatan disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.854.818.000	1.725.433.203	93,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.284.000	3.233.675	98,47
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.978.870	98,94
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	3.532.400	97,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.614.791.000	1.494.688.562	92,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.364.000	1.484.711.800	92,54
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.427.000	9.976.762	95,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.886.000	47.833.820	99,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.782.000	1.767.500	99,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.200.000	32.396.000	97,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.400.000	4.398.050	99,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	14.399.000	14.386.367	99,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.755.000	1.750.000	99,72
Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	1.350.000	1.336.053	98,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.000.000	33.027.257	98,65
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	27.727.800	99,03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.557.000	98,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.516.000	37.843.710	99,56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	16.637.849	69,32
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.516.000	31.460.434	99,82

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.341.000	67.093.913	99,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.341.000	48.321.913	99,96
Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.970.000	99,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.802.000	98,02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.105.000	8.093.300	99,86
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.105.000	8.093.300	99,86
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.105.000	3.104.300	99,98
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.989.000	99,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.327.700	24.848.200	98,11
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.327.700	24.848.200	98,11
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.327.700	24.848.200	98,11
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	81.536.500	81.059.789	99,61
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.536.500	81.059.789	99,61
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.621.000	7.321.200	97,71
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.780.500	2.755.500	99,97
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.849.000	4.823.000	99,59
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.100.000	11.049.850	99,42
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.686.000	18.678.000	99,56
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	32.595.000	32.555.639	99,93
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.905.000	3.876.600	99,58
	1.969.787.200	1.839.434.492	93,38

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Belanja

1. Belanja yang tidak terserap sebagai berikut:

- SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp 1.604.364.000 dengan realisasi Rp 1.484.711.800 atau sebesar 92,54%, angka ini menunjukkan kurang maksimal dikarenakan adanya kekosongan Pejabat Struktural yang tidak terisi dalam waktu yang cukup lama, sehingga penyerapan pada anggaran Gaji dan Tunjangan ASN tidak terserap secara maksimal.
- SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp 24.000.000 dengan realisasi Rp 16.637.849 atau sebesar 69,32%, angka ini menunjukan tidak maksimal dalam penyerapan dikarenakan tagihan listrik yang besarnya fluktuatif.

Selain sub kegiatan diatas sudah mengalami penyerapan yang cukup bagus hanya mengalami sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan – LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp 0,-. Terealisasikan sebesar Rp 0,- atau 0 % dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Buluspesantren Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2025 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0	0

Pendapatan OPD Kecamatan Buluspesantren Tahun Anggaran 2025 mencapai target sebesar 100 % dari anggaran, karena tidak ada realisasi Tahun 2024.

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Buluspesantren TA. 2025 adalah sebesar Rp 1.839.434.492 atau 93,38% dari anggaran sebesar Rp 1.969.787.200. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2025 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	1.604.364.000	1.484.711.800	92,54	1.613.829.669
2. Belanja Barang	330.484.200	320.117.892	96,86	1.570.261.360
3. Belanja Hibah	-	-		
4. Belanja bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	1.934.848.200	1.804.829.692	93,28	3.184.091.029
Belanja Modal				

1. Belanja Modal Tanah	-	-		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.939.000	34.604.800	99,04	47.007.500
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan				
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		
6. Belanja Modal aset tak berwujud				
Jumlah Belanja Modal	34.939.000	34.604.800	99,04	47.007.500
JUMLAH BELANJA	1.969.787.200	1.839.434.492	93,38	3.231.098.529

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dengan TA. 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,42%.

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 4,45 % dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1,13 %.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.804.829.692 mencapai 93,28% dari anggaran sebesar Rp. 1.934.848.200 apabila dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp. 3.184.091.029 mengalami kenaikan sebesar 4,45 %.

b) Belanja Modal

Belanja Modal	2025		(%)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	34.939.000	34.604.800	99,04	47.007.500
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset tetap Lainnya				
Belanja Aset Tak Berwujud				
Jumlah	34.939.000	34.604.800	99,04	47.007.500

Realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp 34.604.800 atau tercapai 99,04% dari anggaran sebesar Rp 34.939.000 Dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp 47.007.500 realisasi belanja modal tahun 2025 naik sebesar 1,13%. Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2025		(%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	34.939.000	34.604.800	99,04%
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tak Berwujud			
Jumlah	34.939.000	34.604.800	99,04%

2. Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Kecamatan Buluspesantren adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	0	0
2	Transfer – LO		
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO		
Jumlah		0	0

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2025 meningkat/turun sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,00 % dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Buluspesantren pada TA.2025 adalah sebesar Rp 1.759.535.512 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan %
BEBAN	1.759.535.512,00	3.301.674.790,00	(46,71)
BEBAN OPERASI	1.759.535.512,00	3.177.469.523,00	(44,62)
Beban Pegawai	1.440.401.346,00	1.608.166.875,00	(10,43)

Beban Barang dan Jasa	319.134.166,00	1.569.302.648,00	(79,66)
JUMLAH BEBAN OPERASI	1.759.535.512,00	3.177.469.523,00	(44,62)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	124.205.267,00	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	117.018.267,00	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	7.062.000,00	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	125.000,00	(100,00)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	124.205.267,00	(100,00)
JUMLAH BEBAN	1.759.535.512,00	3.301.674.790,00	(46,71)

a. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp 1.899.021.293 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.440.401.346,00	1.608.166.875,00	(10,43)
2	Beban Barang dan Jasa	319.134.166,00	1.569.302.648,00	(79,66)
3	Beban Bunga	0	0	
4	Beban Subsidi	0	0	
5	Beban Hibah	0	0	
6	Beban Bantuan Sosial	0	0	
7	Beban Penyisihan Piutang	0	0	
8	Beban Lain - Lain	0	0	
	Jumlah	1.759.535.512,00	3.177.469.523,00	(44,62)

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban Operasi LO tahun 2025 turun sebesar Rp 1.417.934.011 atau sebesar 44,62 % dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Kecamatan Buluspesantren Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.440.401.346

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa TA 2025 sebesar Rp 319.134.166

c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah pada OPD Kecamatan Buluspesantren TA 2025 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Beban	Penerima
1	2	3	4
1			
2	NIHIL		
3			
4			
6			
7			
Jumlah			

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 0,00 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	117.018.267,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	7.062.000,0
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	125.000,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		0,00	124.205.267,00

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang OPD Kecamatan Buluspesantren tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

f. Surplus/defisit – LO

Surplus/defisit – LO untuk tahun 2025 sebesar Rp 1.759.535.512 atau turun sebesar 46,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3.301.674.790.

3. Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.793.082 dan Rp 768.900. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Buluspesantren per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Lancar	TA 2025	TA 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	1.793.082	768.900
	Jumlah	1.793.082	768.900

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 . saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke OPD Kecamatan Buluspesantren per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	Kecamatan Buluspesantren	0	
2.			
3.			

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

No	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	0	
2.		
3.		

3) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.793.082 dan Rp 768.900. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp 1.793.082 merupakan saldo persediaan atas barang habis pakai / ATK yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Audited) (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	1.793.082	768.900
2.	Bahan/Material	0,00	0,00
3.	Barang Lainnya	0,00	0,00
4.			
Jumlah		1.793.082	768.900

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp 880.041.110 dan Rp 845.436.310. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Buluspesantren per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2025	T.A. 2024
1	Tanah	43.281.000,00	43.281.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.601.588.894,00	1.566.984.094,00
3	Gedung dan Bangunan	353.100.000,00	353.100.000,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	(1.122.928.784,00)	(1.122.928.784,00)
Jumlah Aset Tetap		880.041.110,00	845.436.310,00

Penjelasan Aset Tetap:

a. Tanah

Aset tetap berupa tanah tidak ada mutasi sehingga aset tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 nilainya tidak berubah.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin saldo awal Rp 1.566.984.094 dan saldo akhir Rp 1.601.588.894 sehingga pada tahun 2025 ada tambahan mutase sebesar Rp 34.604.800, berupa pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp 1.632.563 dan Rp 45.902.561

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Pendapatan diterima Dimuka	0,00	0,00
3	Utang Belanja	1.632.563	45.902.561
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		1.632.563	45.902.561

Rincian utang belanja terdiri dari :

- Rekening tagihan Listrik sebesar Rp 1.632.563 yang dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2025.

3. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 881.834.192 dan Rp 846.205.210.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp 800.302.649 dan tahun anggaran 2024 Rp 870.878.910

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar	Rp.	0
- Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar	Rp.	0
- Penilaian Kembali Aset Tetap sebesar	Rp.	0

-

3. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp. 0,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir Tahun 2025, terdiri dari:

- Pengakuan atas bunga yang terutang sebesar	Rp.	0
- Pengakuan atas beban dibayar dimuka sebesar	Rp.	0
- Lain-lain sebesar	Rp.	0

-

-

- BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintahan Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 50 (lima puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seluruhnya tersebar di wilayah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membuat laporan keuangan tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2025
PENGGUNA ANGGARAN

AZIDA NURUL HAYYA, S.STP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781017 199711 2 002